

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, 7 APRIL 2015**

Yang terhormat

- *Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau yang mewakili,*
- *Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau yang mewakili,*
- *Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atau yang mewakili,*

- *Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)*
- *Para Pejabat Eselon I Kementerian Perindustrian*
- *Para Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian*
- *Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Hadirin sekalian pegawai Kementerian Perindustrian yang berbahagia,*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Selamat Siang dan Salam Sejahtera,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Penganjangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat.

Hadirin yang saya hormati,

Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, Kementerian Perindustrian melakukan berbagai langkah Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja dan prestasi sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK atas audit Laporan Keuangan tahun 2013, yang telah diraih secara berturut-turut selama 6 (enam) tahun sejak 2008.

2. Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, Kementerian Perindustrian mendapat nilai 73,11 dengan predikat penilaian "B+" dibandingkan tahun 2013.

3. Penghargaan *e-transparency award 2014*

Kementerian Perindustrian memperoleh penghargaan “*e-transparency award 2014*” dengan peringkat keempat dari 10 pemenang utama situs Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik yang diikuti oleh 47 K/L.

4. Pelayanan Publik Versi Ombudsman

Kementerian Perindustrian memperoleh kategori hijau atau tingkat kepatuhan tinggi terhadap UU Pelayanan Publik dari Ombudsman.

5. Inovasi Pelayanan Publik

Salah satu inovasi yang telah dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian adalah Penyelenggaraan Ujian CPNS Online. Dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, penyelenggaraan Ujian CPNS Online Kementerian Perindustrian, termasuk dalam 33 besar dari 515 inovasi pelayanan publik terbaik. Nantinya dari 33 besar inovasi pelayanan publik

tersebut akan diajukan ke *United Nations Public Service Award* (UNPSA).

6. Pelayanan Publik Versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kementerian Perindustrian memperoleh nilai skor total integritas diatas indeks rata-rata (7,22) untuk unit layanan Rekomendasi Impor Barang Industri Tertentu dengan total skor 7,84 pada Unit Pelayanan Publik (UP2) Kemenperin. Penilaian terhadap 40 unit layanan dari 21 Kementerian dan Lembaga.

7. Keterbukaan Informasi Publik

Kementerian Perindustrian meraih peringkat kedua dari 10 Badan Publik Pemerintahan terbaik dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan nilai Keterbukaan Informasi sebesar 98,2. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kalla di Istana Wapres tanggal 12 Desember 2014 di Jakarta.

Dalam membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sesuai dengan Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014, Kementerian Perindustrian juga telah mempersiapkan beberapa peraturan pendukung demi terselenggaranya WBK / WBBM yaitu :

1. Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kemenperin;
2. Kementerian Perindustrian telah membuat Peraturan Menteri Perindustrian No. 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian.
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Disamping itu juga Kementerian perindustrian telah melakukan promosi jabatan secara terbuka, rekrutmen secara terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, *e-procurement*, pengukuran kinerja individu, dan keterbukaan informasi publik.

Hadirin yang saya hormati,

Kepada seluruh aparat Perindustrian, baik satker yang berada di Pusat maupun satker vertikal mulai dari aparat pelaksana sampai dengan Pimpinan Satker/Unit agar secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja

masing-masing agar Kementerian Perindustrian dapat menjadi Kementerian yang bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, kolusif dan nepotis.

Dengan berbagai upaya yang telah kita lakukan tersebut, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, KPK dan Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan penilaian sekaligus pembinaan di lingkungan Kementerian Perindustrian agar selanjutnya mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hadirin yang saya hormati,

Mengakhiri sambutan ini, saya mengharapkan adanya dukungan semua pihak dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Kementerian Perindustrian yang Bersih dan Melayani.

Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Semoga Tuhan YME senantiasa memberkahi kita dalam pengabdian kita terhadap nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**MENTERI
PERINDUSTRIAN**

SALEH HUSIN